



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2024
 Reviewed : 01/06/2024
 Accepted : 11/06/2024
 Published : 15/06/2024

Arif Rahim¹
 Zuhri Saputra
 Hutabarat^{2*}

MENELUSURI JEJAK SEJARAH ADAT BERSENDI SYARAK, SYARAK BERSENDI KITABULLAH DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

Abstrak

Dilakukannya penelitian ini bertujuan menelusuri jejak sejarah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Membicarakan konsep adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah sebagai suatu persoalan memang cukup menarik. Hal itu disebabkan karena kalimat ini sangat sering terdengar apa bila orang berbicara tentang masalah adat di berbagai daerah, terutama yang termasuk dalam cakupan dunia Melayu seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, bahkan sampai Gorontalo, suatu daerah yang terletak dibagian utara pulau Selawesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yakni pemecahan salah sejarah dalam perspektif multi disiplin dan ditopang dengan penerapan metode penelitian historis yang mengacu pada prosedur penulisan sejarah ilmiah, yang terdiri dari empat kelompok kegiatan. Keempat kelompok kegiatan tersebut meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiograf. Hasil penelitian ini: 1) Penelusuran sejarah abs-sbk : telaahan pertemuan bukit siguntang tanjung simalidu sebagai titik pangkal, 2) Lahirnya adagium ABS-SBK di Minangkabau berpangkal pada terjadinya konflik sosial antara kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi adat lama dengan kaum agama yang ingin menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sekaligus menghapuskan tradisi adat lama yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Sejarah Adat, Bersendi Syarak

Abstract

The aim of this research was to trace the historical traces of the syarak-jointed syarak, syarak-jointed kitabullah customs in Bumi Sebung Jambi Sembilan Lurah. Discussing the concept of customs based on syara, syara based on the Book of Allah as an issue is quite interesting. This is because this sentence is often heard when people talk about customary issues in various regions, especially those within the Malay world such as West Sumatra, Riau, Jambi, Aceh, even Gorontalo, an area located in the northern part of Selawesi Island. This research uses a multidimensional approach, namely solving historical errors from a multi-disciplinary perspective and is supported by the application of historical research methods which refer to procedures for writing scientific history, which consists of four groups of activities. The four groups of activities include heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this research: 1) Tracing the history of ABS-SBK: studying the meeting of Bukit Siguntang Tanjung Simalidu as the starting point, 2) The birth of the ABS-SBK adage in Minangkabau stems from the occurrence of social conflict between indigenous people who want to maintain old traditional traditions and religious groups who wants to implement Islamic law as a whole while eliminating old traditional traditions which are considered to be contrary to the teachings of the Islamic religion. discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

Keywords: Traditional History, Shared with Syarak

PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat untuk keperluan Seminar yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi dengan tema ‘Menelusuri Jajak Sejarah Adat Besendi Syara’ Syara’ Besendi Kitabullah

^{1,2} FKIP, Universitas Batanghari Jambi
 email:zuhri2saputra1hutabarat9@gmail.com

di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”.Membicarakan konsep adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah sebagai suatu persoalan memang cukup menarik. Hal itu disebabkan karena kalimat ini sangat sering terdengar apa bila orang berbicara tentang masalah adat di berbagai daerah, terutama yang termasuk dalam cakupan dunia Melayu seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, bahkan sampai Gorontalo, suatu daerah yang terletak dibagian utara pulau Sulawesi.

Konsepsi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (selanjutnya ditulis ABS-SBK) paling sering dibicarakan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena lahirnya falsafah ini berakar pada suatu dialiktika ideologis yang berakibat terjadinya konflik fisik yang berimplikasi besar pada masyarakat Minangkabau. Kendati konflik itu sudah lama berakhir tetapi dialog seputar ABS-SBK Adat masih menjadi topik perbincangan adat hingga sekarang, terutama di kalangan generasi muda.

Adagium ABS-SBK saat ini juga menjadi bagian yang terpisahkan dalam adat dan tradisi Masyarakat Melayu Riau. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau Dengan Islam yang ditulis oleh Zikri Darussamin, seorang dosen UIN Sultan Syarif Kasim dinyatakan Masyarakat Melayu-Riau adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Provinsi Riau yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni alQur`an dan al-hadis serta adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (living law) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu-Riau. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan, ”adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah”. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu (Darussami,2014 : 145) (Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.11, No.2 Juli - Desember 2014)

Untuk memperjelas adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu-Riau, perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk dan isi adat yang terdapat di Minangkabau. Hal itu perlu dilakukan karena ada hubungan historis antara orang-orang Minangkabau dengan orang Melayu-Riau, terutama pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di mana Adat Minangkabau, pada waktu itu dan masa-masa sesudahnya, mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan adat di daerah Melayu-Riau. Masyarakat Melayu-Riau mengenal dua bentuk adat, yaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih dengan dua bentuk sistem kekerabatan, yakni sistem kekerabatan matrilineal dan parental. Kedua corak ini, terutama Adat Perpatih mengandung unsur-unsur adat yang berlaku di Minangkabau (Darussamin, 2014 : 148)

Falsafah ABS-SBK juga menjadi landasan adat dan kebudayaan etnis Melayu di Malaysia. Sebuah tulisan yang ditulis oleh Muhammad Takari bin Julin Syahrial menggambarkan kedudukan ABS-SBK dalam system adat dan kebudayaan rumpun Melayu. Dikatakannya bahwa dalam rangka menentukan kebijakan dan arah peradaban Melayu, maka masyarakat Melayu mendasarkannya kepada institusi generik yang disebut adat. Dalam rangka menghadapi dan mengisi globalisasi, masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan dalam adat Melayu. Adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikonsepsikan sebagai adat bersendikan syarak—dan sayarak bersendikan kitabullah. (Muhammad Takari bin Jilin Syahrial)

Falsafah yang sama juga terdapat dalam system adat Aceh, yang menyatakan Adat bersendikan syari’at. Keduanya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari’at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan “hadih madja”, Adat ngon syari’at lagee dzat ngon sifeut. hukum syariat dengan adat, seperti zat dan sifatnya

Masyarakat Gorontalo mengenal istilah Aadati hula-hula to Sara', Sara' hula-hula to Kuru'ani maksudnya yaitu Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Al-Qura an <http://warisanbudaya.kemendkbud.go.id/>. Sebagai bagian dari dunia Melayu daerah Jambi juga

menggunakan adagium ABS-SBK sebagai landasan falsafah adat dan kebudayaan di daerah Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi menyatakan bahwa adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; Titian teras betango batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.

Banyak kalangan mengakui bahwa ABS-SBK itu sudah menjadi landasan filosofis adat Melayu Jambi sejak masa awal ketika kerajaan Melayu Jambi dijadikan kerajaan Islam pada awal abad 16. Masalahnya adalah, dengan dianutnya filosofis ini oleh banyak daerah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, timbul pertanyaan tentang bagaimanakah proses kemunculan ABS-SBK hingga menjadi landasan filosofis adat dan kebudayaan melayu Jambi? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan, tentang proses kemunculan dan kedudukan ABS-SBK dalam sistem adat Melayu Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yakni pemecahan salah sejarah dalam perspektif multi disiplin (Kartodirdjo : 1992) dan ditopang dengan penerapan metode penelitian historis yang mengacu pada prosedur penulisan sejarah ilmiah, yang terdiri dari empat kelompok kegiatan. Keempat kelompok kegiatan tersebut meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiograf (Garraghan : 1957, Nugroho Notosanto, 1978 : 36-43).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PENELUSURAN SEJARAH ABS-SBK: Telaahan Pertemuan Bukit Siguntang Tanjung Simalidu Sebagai Titik Pangkal.

Jika menelusuri keberadaan ABS-SBK dalam sejarah adat Jambi, maka umumnya ada dua pendapat yang menceritakan tentang asal-muasal munculnya ABS-SBK hingga dijadikan sebagai landasan filosofis adat dan kebudayaan masyarakat Melayu Jambi. Pendapat pertama, konsep ABS-SBK muncul sebagai bagian dari perkembangan sejarah yang terjadi dalam wilayah Jambi sendiri. Sedangkan pendapat kedua mengatakan ABS-SBK muncul pertama kali di Minangkabau sebagai hasil kesepakatan konflik antara golongan adat dengan golongan agama yang mengakibatkan perang saudara. Pada awal abad 19. Hasil kesepakatan itu kemudian diadopsi di dunia Melayu terutama di Riau dan Jambi karena adanya kesamaan adat yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Adanya kesamaan adat itu karena adat yang berlaku di daerah Riau dan Jambi berasal dari Minangkabau, atau paling tidak mendapat pengaruh yang kuat dari Minangkabau.

Pandangan pertama berdasarkan pada pemikiran bahwa sejak awal abad 16 kerajaan Jambi dimaklumkan sebagai kerajaan Islam oleh Oleh Orangkayo Hitam, raja kerajaan Jambi yang memerintah antara tahun 1500-1515. Kerajaan Jambi sendiri berdiri tahun 1460, didirikan oleh Putri Selaro Pinang Masak yang besar dari Pagaruyung dan merupakan anak dari Ananggawarman Raja Minangkabau. Ketika sampai di Jambi Putri Selaro Pinang Masak bertemu dengan serorang yang bergelar Datuk Paduka Berhala, seorang laki-laki yang dikatakan anak raja dari negeri Istambul (Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari, 1982 : 5). Berhubung Datuk Paduka Berhala seorang yang beragama Islam sejak itulah diyakini agama Islam dianut pertama kali oleh masyarakat Jambi.

Putri Selaro Pinang Masak memerintah bersama suaminya hingga tahun 1480. Kekuasaan selanjutnya beralih pada anak mereka. Orangkayo Pingai yang merupakan anak tertua dari pasangan itu menjadi raja dan memerintah antara tahun 1480 hingga 1490. Untuk masa sepuluh tahun berikutnya kekuasaan beralih pada anaknya yang nomor dua bernama Orangkayo Pedataran. Sedangkan untuk periode selanjutnya kekuasaan dipegang oleh Orangkayo Hitam yang memerintah selama 15 tahun yakni dari tahun 1500 hingga tahun 1515.

Masa pemerintahan Orangkayo Hitam dapat dikategorikan sebagai salah satu periode yang paling krusial dalam sejarah Jambi. Hal itu disebabkan karena pada masa pemerintahannya Jambi melepaskan status dan keterikatannya sebagai negara vazal dari kerajaan Jawa. Pada masa dia pula Islam secara resmi dijadikan sebagai agama kerajaan. Pasal 36 Undang-undang, Piagam, dan Kisah Negeri Jambi mengatakan ...peri menyatakan ini awal Jambi zaman Orang Kayo Itam bin Datuk Paduka Berhala yang mengislamkannya kepada ajrat nabi saw, tujuh ratus

tahun dan kepada tahun Alif bilangan Khamsiah, dan kepada sehari bulan Muharam hari kamis pada waktu zuhur, masa itulah masa Islam ini Jambi mengucapkan dua kalimat syahadat (sembahyang lima waktu puasa sebulan Ramadan), zakat dan fitrah. Sekarang ajrat nabi saw.1358 tahun maka jumlahnya Islam ini Jambi lamanya 658 tahun...(Ngebi Sutho Dilago, 1982 :79)

Sumber di atas menerangkan waktu mula-mula Islam masuk ke negeri Jambi. Apa bila angka tahun yang disebutkan dicocokkan dengan tahun masehi sumber diatas ditulis tahun 1358 H maka kira-kira waktunya adalah 84 tahun yang lalu. Dan apabila waktu itu dinyatakan Islam di Jambi sudah berusia 658 tahun, maka Islam masuk ke Jambi tahun 700 H itu sama artinya dengan tahun 1301 M. Dengan demikian perhitungan tahun mengandung selisih sekitar 160 tahun...Tapi masalah selisih tahun ini akan diabaikan karena fokus tulisan ini adalah masalah penelusuran sejarah ABS-SBK. Hal ini dinilai lebih penting karena pernyataan ABS-SBK erat kaitannya dengan ditetapkannya Jambi sebagai Kerajaan Islam.

Berdasarkan tuturan sejarah adat Jambi kemunculan ABS-SBK sebagai dasar falsafah adat Melayu Jambi berpangkal pada pertemuan Bukit Siguntang pada tahun 1502 yang dihadiri oleh Orangkayo Hitam beserta perangkatnya dari Kerajaan Melayu Jambi, serta Raja Bakilat Alam beserta Tuan Qadi dari Kerajaan Minangkabau serta kepala adat Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah yang tergabung dalam empat di atas, tigo di baruh, Pamuncuk dan Pembarap. Sedianya pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Demang Lebar Daun raja Kerajaan Palembang, dan raja Kerajaan Indrapura. Namun tiga raja yang disebut terakhir tidak menghadiri pertemuan itu disebabkan factor jarak yang jauh serta kendala jalan yang sulit (Gafari,2018 61).

Pemberlakuan syariat Islam terimplementasi dalam hukum dasar adat Jambi yang disebut Pucuk Undang yang terdiri dari lima unsur yaitu : Pertama, tetian teras betanggo batu yang dimaknai sebagai semua hukum Allah yang taka ada campur tangan manusia terhadapnya. Kedua Cermin yang tidak kabur yang bermakna Al Qur an sebagai pedoman hidup manusia Ketiga, Lantak nan tak goyah yang maknya hadits Rasulullah. Keempat Kato mufakat atau kato seiyo yang berarti hukum yang dibuat masyarakat untuk mengatur tentang sesuatu. Kelima, Tidak lapuk kerano hujan dan tidak lekang kareno paneh, dimaknai sebagai sifat dari keempat hukum terdahulu (Cholif,2009 : 110-112).

Sumber lain yang dijadikan sebagai landasan kemunculan ABS-SBK di Jambi adalah Perjanjian Sitinjau Laut yang diadakan pada tahun 1530. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kerancuan dalam hal penerapan hukum di wilayah Jambi bagian barat, terutama wilayah Jambi dan Kerinci akibat adanya dua sistem hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, yakni Undang yang turun dari Pagaruyung (sejak tahun 1347) serta taliti yang mudik dari Jambi, sejak berdirinya kerajaan Pucuk Jambi tahun 1526 yang berkedudukan di Muara Mesumai (Aulia Tasman, 2014). Dengan demikian petemuan itu bertujuan untuk memadukan Undang dengan Taliti yan akan ditetapkan di wilayah Kerinci dan Merangin.

Bila kedua sumber di atas beserta narasi penjelasannya dikaitkan dalam konteks sejarah ABS-SBK, maka ada beberapa hal yang menimbulkan keraguan. Terutama terhadap peristiwa pertemuan Bukit Siguntang yang dipandang banyak kalangan sebagai starting point kemunculan ABS-SBK di daerah yang disebut sebagai Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Tanggal 2 Juli yang dipandang sebagai hari pertemuan Bukit Siguntang dijadikan sebagai Hari Adat Provinsi Jambi (<https://jambi.antaranews.com/berita/512317/2-juli-ditetapkan-sebagai-hari-adat-melayu-jambi>).

Tapi sebelum memberi ulasan ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu konsep sejarah yang akan dapat dijadikan parameter dalam melakukan ulasan. Metode yang dimaksud adalah metode penelitian sejarah sebagai hal yang harus dilakukan oleh sejarawan apabila dia akan meneliti sejarah agar dapat menghasilkan tulisan sejarah yang baik, obkektif, dan ilmiah. Dengan demikian baik atau tidaknya kualitas tulisan sejarah dapat dilihat dari metode yang dilakukannya.

Mestika Zed (2005), seorang profesor ilmu sejarah dari Universitas Negeri Padang, mengartikan sejarah ilmiah sebagai suatu telaahan kritis tentang kehidupan masa lampau manusia dan lingkungannya berdasarkan satandar metode-metode ilmiah. Tentang metode sejarah ilmiah telah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh G.J Garraghan dan Jean Delanglez dalam bukunya A Guide to Historical Method terbitan Fordham University Press tahun 1957. Dalam buku itu metode sejarah diartikan sebagai a systematic body of principles an rules

designed to aid effectively in gathering the sources materials of history, appraising them critically, and presenting a synthesis (generally in written form) of the result achieved. More briefly it may be defined as “ a system of right procedure for the attainment of (historical) truth) Kumpulan prinsip yang sistematis dan aturan yang dirancang untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan bahan sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis (umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil yang dicapai. Ringkasnya dapat didefinisikan sebagai “sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran historis (Garraghan,1957 : 33).

Apa bila itu diturunkan ke dalam tataran implementasi penulisan sejarah maka penulisan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi : analisis dan sintesis, dan tahap penulisan (Kuntowijoyo,1995 : 89) Pakar sejarah lainnya menyebutkan enam tahap dengan menambahkan catatan apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik penelitian (Helius Sjamsuddin,2007 :85). Dari seluruh tahapan di atas, tahap pengumpulan sumber dan verifikasi adalah yang paling penting. Hal itu disebabkan karena keberadaan sejarah sangat tergantung pada ketersediaan sumber atau data-data sejarah. Leopold Von Ranke yang dikenal sebagai bapak pelopor sejarah ilmiah bahkan sampai mengatakan “tak ada dokumen tak ada sejarah (Nina Herlina,2000 :83-86). Selain itu tahapan kritik yang dilakukan atas data-data yang diperoleh juga sangat menentukan. Melalui tahapan kritik sebagian data akan lolos dan akan dinilai sebagai fakta sejarah, sementara sebagian lainnya akan tersisih menjadi data ataupun keterangan yang tidak relevan dengan sejarah ilmiah.

Data tentang Pertemuan Bukit Siguntang 1502 yang disebut sebagian kalangan sebagai Rapat Besar Adat yang mendeklarasikan ABS-SBK, dalam kacamata metode sejarah kedudukannya sangat lemah. Hal itu karena pertemuan itu sama sekali tak ada meninggalkan bukti sejarah, apakah itu dalam bentuk arsip ataupun dokumen lainnya seperti foto, peralatan, pagam ataupun prasasti. Selain itu dokumen-dokumen yang akan membentuk fakta sosial di sekitar pertemuan itupun dapat dikatakan tidak ada. Selama ini keterangan tentang pertemuan Bukit Siguntang itu hanya berdasarkan tradisi lisan dalam kategori tuturan.

Sebagian pakar sejarah menganggap tradisi lisan bisa juga dijadikan sebagai sumber sejarah. Tetapi keterangannya tidak dapat langsung dijadikan sebagai fakta sejarah dengan cara mengutipnya dan dijadikan sebagai argumen dalam penulisan sejarah karena tradisi lisan harus diperlakukan sebagai hipotesis (Vansina,2014: 305). Untuk menjadikan tradisi lisan sebagai sumber sejarah peneliti harus menangkap pesan, serta mencari nilai simbolis serta makna yang dimaksud, dan tidak boleh menafsirkannya tanpa referensi kongkrit terhadap pesan itu sendiri yang terkandung dalam tradisi lisan (Vansina,1985: 194-195).

Jika keterangan tentang pertemuan Bukit Siguntang itu dikritik sebagai data sejarah maka akan terdapat sejumlah kelemahannya. Pertama, Menurut Muchtar Agus Cholif, pertemuan bukit Siguntang dilatar belakangi oleh masalah perbatasan antara kerajaan Jambi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Lebih jauh dikatakan :

... Sementara itu sebelum Orang Kayo Hitam menjadi raja, kerajaan Melayu telah terbelah dua, ada kerajaan Jambi, ada kerajaan Pagaruyung, sedang batas wilayah kedua kerajaan itu belum tegas. Begitu pula batas dengan kerajaan Demang Selebar Daun Palembang, dan batas dengan kerajaan Rejang Lebong Rajo Tiangpat, dan begitu pula batas dengan kerajaan Inderapura tidak jelas, maka kira-kira tahun 1502 M diadakan RAPAT ADAT/RAIMUNA ADAT di Bukit Siguntang Tuo Somai di daerah Tanjung Simalidu, batas antara, batas antara Tanah Pilih dan Pagaruyung di sekitar Sungai Serut (Batang Tebo) (Cholif, 2009 : 106).

Guna lebih utuhnya keterangan tersebut dikutip pula tentang hasil dari pertemuan tersebut....

..... Dan antara yang dipertuan Pagaruyung dengan yang dipertuan dari tanah pilih diadakan SUMPAAH SETIO dengan Al Qur'an 30 (tiga puluh), dan BERCHARAK TUNTUNG KERIS, semua KERIS PUSAKO yang ada dicabut dan dihujamkan kelangit ditusuk kebumi, ke langit sama dikadah, kebumi sama dikutungkan, samo diserahkan nyawa kepada Allah, bahwa dalam KERBAU SETENGAH DUO, DALAM LADUNG BERAS SERATUS GANTANG, darah samo dikacau, daging samo dikimpoi, petis sekepeng dipertigo bahwa mulai saat itu” ADAT BERSENDI SYRAK, SYARAK BERSENDI KITABULLAH”, baik undang di Pagaruyung maupun Taliti (adat) di tanah pilih, sekepeng dibawa oleh arus nan berdentung ombak nan berdebur Alam nan Barajo yang dipertuan tanah pilih, sekepeng dibawa oleh gunung nan

memuncak ditepung angin lurah dalam diturut air yang dipertuan Pagaruyung, sekeping balik kerumput dengan rantai bumi dengan langit, dan digunting rambut yang dipertuan berdarah putih serta pemangku adat, ditanam dibumi siguntang sebagai ganti batang tubuh yang dipertuan untuk jadi saksi, dipekikkan kelangit dihimbangkan ke gunung, disawingkan kelaut, supaya disaksikan oleh rumput dengan bilah, oleh bumi dengan langit dari masa ke masa sampai ke anak cucu (Cholif, 2009 :107).

Keterangan inilah yang diyakini oleh Sebagian kalangan sebagai landasan dari munculnya adagium ABS-SBK di Jambi. Pendapat ini banyak dikutip terutama oleh kalangan pelajar dan mahasiswa apabila mereka sedang membuat tugas atau melakukan penelitian terutama yang terkait dengan sejarah, kebudayaan, serta hukum adat Melayu Jambi. Sehubungan dengan itu, maka kritik yang muncul:

Pertama kali adalah data ini bukan arsip ataupun dokumen dari pertemuan itu. Melainkan adalah cerita rakyat yang dituturkan yang rawan mengalami penyusutan atau penambahan isi cerita. Jika pun ada fakta sejarah tentang Pertemuan Tanjung Simalidu, adalah yang disampaikan oleh Barbara Watson Andaya yang menerangkan bahwa Raja Pagaruyung pernah memanggil Sultan Jambi untuk menghadiri pertemuan di Semalidu guna menyampaikan keinginannya memberi rantau mulai dari Semalidu ke Tanah Pilih, dari Tujuh Kota dan Sembilan Kota ke Jambi, dari Petajin (dekat Muara Tebo) ke Sabak dekat pesisir pantai di Sungai Nior. Alasan pemberian itu karena Raja Pagaruyung tak kuasa untuk mendatangi semua kaulanya di Sungai Rantau (Andaya, 2016 : 253).

Kedua, adanya ketidak sesuaian antara latar belakang yang mendorong. Pertemuan ini dilatar belakangi oleh masalah perbatasan, tetapi hasil pertemuan justru berupa maklumat landasan filosofis kerajaan Jambi. Logikanya, jika latar belakang dari suatu pertemuan adalah masalah tapal batas yang belum jelas tentulah hasil pertemuannya berupa hasil persetujuan penetapan tapal batas.

Ketiga. Jika pertemuan ini memang pernah terjadi, maka pertemuan ini memang lebih layak disebut perundingan masalah tapal batas kerajaan,, ketimbang rapat adat, karena pertemuan ini mengundang raja-raja kerajaan tetangga yang berbatasan langsung dengan kerajaan Jambi kecuali kerajaan Inderapura. Tapi anehnya Kerajaan Inderapura juga diundang (meski tidak bisa hadir) padahal masa itu Kerajaan Jambi tinak berbatas langsung dengan kerajaan Inderapura karena pada masa itu wilayah kerajaan Jambi hanya meliputi wilayah dari Selat Berhala sampai Kuto Buayo Rangkiling Sarolangun sekarang (Jurnal Titian Vol.2 2018 :349).

Keempat, dari segi tempat pelaksanaan perundingan yakni di Bukit Siguntang Tanjung Simalidu, perbatasan kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Jambi, maka lebih cocok dikatakan bahwa pertemuan tersebut adalah perundingan masalah perbatasan, karena dalam tradisi politik hubungan internasional, bila terjadi konflik antara dua negara maka pertemuan diadakan di zona demarkasi perbatasan kedua negara tersebut atau di negara lain yang dianggap netral.

Kelima, sulit untuk menyatakan pertemuan Bukit Siguntang sebagai Rapat Besar Adat, mengingat tidak ada bukti-bukti sejarah yang kuat baik berupa risalah rapat maupun bukti-bukti sejarah yang menunjukkan situasi sosial (perang saudara, konflik sosial, protes sosial dan lain-lain) yang dialami masyarakat Jambi pada masa itu, sehingga melahirkan urgensi pelaksanaan rapat adat yang besar. Suatu pertemuan besar dalam sejarah biasanya dilatar belakangi oleh suatu kejadian besar yang mengguncang kehidupan masyarakat sehingga memerlukan pertemuan yang perlu dihadiri oleh seluruh raja kerajaan tetangga (Pagaruyung, Palaembang, Rejang Lebong, dan Inderapura) Jika ituasi sosial itu memang ada dan terjadi tentulah ada meninggalkan bukti sejarah. Selain itu Pertemuan Bukit Siguntang juga sulit dipercaya sebagai Rapat Besar Adat karena tidak sesuai dengan konsep negara kerajaan tradisional yang pada umumnya bersifat monarki absolut. Dalam sistem monarki absolut kekuasaan raja tidak terbatas. Jabatan raja adalah sakral. Jadinya kepatuhan kepada raja adalah kewajiban alamiah (William Outhweite, 2008 : 531). Dalam pengertian ini seorang Raja dapat saja menerapkan hukum atau undang-undang berdasarkan pikirannya sendiri atau berdasarkan masukan dari para penasihatnya, tanpa perlu menagadakan rapat adat yang melibatkan negara lain.

Keenam. Dikonversinya agama Islam sebagai sebagai kerajaan dapat dikatakan peristiwa besar dalam sejarah Jambi karena telah berhasil merubah corak kerajaan Jambi dari kerajaan Budha menjadi kerajaan Islam. Namun kerana pengadopsian tersebut dimulai dari kalangan istana kerajaan maka pengadosian Islam cenderung tidak akan menimbulkan gesekan yang

besar pada tataran masyarakat bawah. Hal itu disebabkan karena dalam sistem negara kerajaan tradisional, kedudukan raja sangat tinggi dan dihormati, bahkan dianggap suci sebagai wakil tuhan di muka bumi. Oleh sebab itu perkataan dan perintahnya dianggap sebagai hukum yang harus dituruti. Dalam konteks masuknya agama Islam di Jambi masalahnya lebih sederhana karena Islam dianut terlebih dahulu oleh raja, dalam hal ini rakyat cenderung mengikuti. Dan apa bila raja akan menerapkan hukum kerajaan berdasarkan Islam maka itu bisa saja terjadi tanpa diikuti oleh konflik sosial ataupun peristiwa-peristiwa besar yang memerlukan rapat adat besar yang perlu melibatkan seluruh raja kerajaan tetangga. Kalau toh raja akan melakukan pertemuan maka sifatnya adalah pemberitahuan dan sosialisasi terhadap rakyatnya. Dan itu akan cukup dengan menggunakan aparat kerajaan dan membicarakannya di kota raja sebagai pusat kerajaan. Tetapi dengan diterapkannya hukum Islam dalam kerajaan bukan berarti adagium ABS-SBK otomatis ada. Karena faktanya banyak kerajaan yang adatnya berdasarkan Islam tetapi tetapi adagium yang dijadikan dasar filosofisnya menggunakan diksi dan kalimat lain. Seperti yang terdapat di Aceh.

Ketujuh, dari segi isi teks (teks yang dimaksud bukan arsip atau catatan tertulis lainnya tetapi tradisi lisan yang telah ditulis) pertemuan Bukit Siguntang juga mengandung kejanggalan. Di dalamnya dikatakan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh adat serta Qadi dari Pagaruyung dan Tanah Pilih. Jabatan Qadi adalah jabatan yang biasanya ada dalam kerajaan Islam yang berperan sebagai hakim dalam menetapkan serta menjalankan hukum-hukum syariat Islam pada kerajaan tersebut. Dalam hal ini keterangan sejarah tentang bukit Siguntang dikatakan bahwa pertemuan itu terjadi tahun 1502 (awal abad 16). pada hal waktu itu kerajaan Pagaruyung belum sebagai kerajaan Islam, karena agama Islam baru dijadikan agama kerajaan Pagaruyung pada pertengahan abad 16 (Dahlan Mansur, 1970 : 63). Dengan demikian jabatan Qadi, atau dalam sistem kerajaan Pagaruyung disebut Tuan Qadi baru ada dan dimasukan kedalam Basa Ampek Balai (semacam lembaga kementerian kerajaan) setelah agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan.

Kedelapan narasi hasil pertemuan Bukit Siguntang mengatakan bahwa raja Pagaruyung dan raja Jambi melakukan sumpah setia dengan menggunakan Quran 30 juz sembari menyerahkan nyawa mereka atas nama Allah. dalam hal ini bagaimana mungkin seorang yang belum beragama Islam bersumpah setia atas nama Allah dengan menggunakan Al Quran tiga puluh juz. Hal ini menunjukkan bahwa narasi hasil pertemuan Bukit Siguntang persepsi yang dibangun oleh generasi setelahnya Ketika mereka ingin memasukan nilai-nilai ke dalam peristiwa tersebut.

Kesembilan. Kalau narasi tentang pertemuan Bukit Siguntang benar adanya maka dapat dikatakan masuknya agama Islam di Jambi dan di Minangkabau dalam waktu yang relatif bersamaan. Alasannya jika benar Raja Minangkabau datang ke pertemuan bersama Tuan Qadi dan mereka bersumpah setia dengan raja Jambi dengan atas nama Allah dan menggunakan Qur an maka tentulah sebelum mereka dating Kerajaan Minangkabau telah menganut agama Islam. Sebab tidak mungkin jabatan Qadi muncul dalam waktu yang tiba-tiba sebagai bagian dari struktur kerajaan. Paling tidak Pagaruyung telah menganut agama Islam selama 20-30 tahun sebelum tahun 1502 (abad 15). Kalau ini benar maka gugurlah pepatah yang mengatakan Undang turun dari Pagaruyung, Taliti Mudik dari Jambi, karena sebelum mudik dari Jambi Pagaruyung telah beragama Islam

Berdasarkan sejumlah kritik diatas maka belum dapat dipastikan tentang bagaimana kedudukan Islam dalam kerajaan Jambi, terutama bila dikaitkan dengan masalah hukum dan pemerintahan. Status hubungan Islam dan Kerajaan Jambi baru tampak lebih jelas setelah disusunnya Undang-undang Jambi pada tahun 1866 oleh Ki Demang Setia Wiguna Dja'far atas perintah Sultan Ratu Ahmad Nazaruddin. Pada bagian penjelasan dari Undang-undang yang berjumlah 32 pasal itu dinyatakan bahwa segala yang disebut dalam Al Quran disebut hukum, dan barang siapa yang tidak memutuskan berdsarkan wahyu Allah sesungguhnya mereka kafir..sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka orang-orang berperilaku buruk, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang munafik.

Penjelas Undang-undang tersebut jelas menyebutkan bahwa segala yang disebut dalam Al Qur an adalah hukum, hal itu menunjukkan Al Quran adalah hukum tertinggi. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Alquran adalah sumber ideologi kerajaan. Meskipun demikian bila Undang-undang tersebut adagium ABS-SBK maka undang undang tersebut tidak menyebutkan

ABS-SBK. Dalam konteks ini Undang-undang Kerajaan hanya menegaskan Agama Islam sebagai sumber hukum kerajaan.

II. Abs-Sbk Di Minangkabau Dan Pengaruhnya

Bagian tulisan ini membahas perspektif lain tentang kemunculan ABS-SBK di daerah Jambi dengan mengaitkannya dengan proses sejarah lahirnya konsep ABS-SBK di Minangkabau dan pengaruhnya di dunia Melayu.

Lahirnya adagium ABS-SBK di Minangkabau berpangkal pada terjadinya konflik sosial antara kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi adat lama dengan kaum agama yang ingin menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sekaligus menghapuskan tradisi adat lama yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya mempertentangan *vis a vis* kedua golongan ini tidak sepenuhnya tepat karena kaum adat adalah penganut ajaran Islam, serta kaum agama pun hidup dalam struktur adat. Tetapi perbedaan ini muncul dari sudut pandang implementasi adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Pertentangan kedua golongan itu muncul ke permukaan setelah kembalinya tiga orang haji dari Mekah yang terpengaruh dengan aliran Wahabi yang gerakannya sedang memuncak di Arab Saudi pada awal abad 19. Sebagai orang-orang yang menyaksikan gerakan tersebut serara langsung, maka mereka ingin pula menerapkan konsep dan ajarannya di Minangkabau dengan cara-cara seperti yang mereka saksikan di Jazirah Arab termasuk dengan cara kekerasan. Dalam suatu pidatonya Tuanku Nan Renceh salah satu panglima Perang Padri menjelaskan berbagai anjuran dan larangan agama seperti mengisap madat, meminum arak, merokok, makan sirih, mengadu ayam, main kartu dan berdadu. dan mengancam akan melakukan hukuman mati bagi setiap orang yang melanggarnya. (Radjab, 1964 :23) Kondisi sosial Minangkabau yang bercorak matrilineal serta memiliki adat kebiasaan yang seringkali berlawanan dengan faham Wahabi menyebabkan gerakan ini mendapat dukungan masyarakat terutama para ulama.

Tentu saja tidak semua ulama yang setuju dengan cara-cara gerakan yang dibawa oleh ketiga orang haji tersebut. Tuanku Koto Tuo seorang ulama tua yang sangat dihormati menentang cara dakwah tersebut (Taufik Abdullah, 1990 :158-158), tetapi pengaruhnya terdesak ke belakang oleh kalangan ulama muda yang merasa peranannya kurang dihargai oleh kelompok adat. Sebaliknya kelompok adat yang dipimpin oleh para penghulu serta mendapat dukungan dari pihak kerajaan berpegang teguh dengan tatanan lama yang menyeimbangkan kedudukan adat dan agama Islam.

Asal-muasal konflik dapat ditelusuri ke masa awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Minangkabau. Menurut Hamka, agama Islam sudah mulai masuk ke Minangkabau sejak abad ketujuh. Pada masa itu telah ada Namun tidak ada bukti yang menunjukkan apakah agama Islam telah dianut oleh penduduk lokal. Agama Islam baru mulai dianut oleh penduduk Minangkabau sejak abad 14 di daerah pesisir barat Minangkabau. Dari pesisir Islam kemudian diperkenalkan ke masyarakat pedalaman pada pertengahan abad 16 (Loeb, 2013: 116). Kawasan pedalaman merupakan pusat konsentrasi pemukiman penduduk Minangkabau, dimana adat mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Melalui metode dakwah yang moderat agama Islam akhirnya diterima oleh masyarakat pedalaman yang disebut daerah *luhak nan tigo* (Tanah Datar, Aham, dan Lima puluh kota) utamanya oleh keluarga kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad 16. Hal itu ditandai oleh catatan tentang raja yang memerintah di Pagaruyung yaitu Sultan Alif yang memerintah dalam kisaran waktu 1560-1580 (Dahlan Mansur, 1970 :63)

Kendati Minangkabau terbilang agak belakangan dalam menerima agama Islam namun proses pengislamannya sangat cepat. Hal itu disebabkan oleh watak oaring Minangkabau yang cenderung cepat menyerap pembaharuan terutama bila pembaharuan itu tidak bertentangan secara radikal dengan sistem kepercayaan yang mereka anut sebelumnya (Alaidin Koto, 1997.18-19).

Dengan diterimanya Islam di kalangan istana kerajaan, mulailah berubah struktur kerajaan. Kerajaan kini diperintah oleh tri umvirat yang disebut Raja Tigoselo yakni Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Ibadat berkedudukan di daerah yang diberi nama Islam yaitu Sumpu Kudus. Jabatan keagamaan dimasukan menjadi salah satu elemen Basa Ampek Balai yaitu semacam lembaga kementerian kerajaan. Basa Ampek Balai yang sebelumnya terdiri dari departemen-departemen yang mengurus masalah urusan dalam dan luar negeri dipegang oleh Datuk Bandaharo di Sungai Tarab, masalah hukum, oleh Tuan Indomo di Suroaso, urusan perekonomian oleh Tan Machudum di Sumaniak, serta urusan pertahanan dan keamanan oleh

Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipuh, kini bertambah dengan urusan keagamaan yang dipimpin Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting. Namanya Lembaga tetap mengguna Basa Ampek Balai meskipun jumlah elemennya kini berjumlah lima departemen.

Pada dataran yang lebih rendah juga berlaku hal yang sama. Kepemimpinan kaum kini memasukan ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Lembaga kepemimpinan kaum terdiri dari penghulu sebagai pimpinan tertinggi, selanjutnya penungkat yang berperan sebagai wakil dan pembantu tugas-tugas penghulu serta tuangku yang dijabat oleh ahli agama yang ada dalam kaum tersebut. Ketiganya membentuk Lembaga kepemimpinan kaum yang disebut tungku tigo sajarangan. Selain itu muncul pula gelar-gelar adat yang menunjukkan kedudukan peran dan kedudukan Islam ditengah masyarakat. Sebutan gelar-gelar tersebut adalah Labai, Katib, Kari, fakiah, Malin dan lain-lain.

Pengaruh Islam juga tampak apa bila masyarakat akan melakukan pemekaran nagari. Keberadaan masjid kini menjadi salah satu syarat utama pembentukan sebuah nagari. Aturan persyaratannya adalah balabuah, batapian, babalai, bamusajik.

Meskipun agama Islam telah dianut dan berhasil mempengaruhi tatanan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, masih terdapat masalah besar dari segi implementasinya. Pada umumnya Islam dianut hanya pada tataran nominal, dalam arti minim pengamalan. William Marsden menggambarkan walaupun orang Minangkabau telah menganut Islam, dia jarang melihat orang-orang melakukan sujud kecuali bagi para ulamanya. Bahkan dalam bulan suci puasa hanya Sebagian yang melaksanakannya (Marsden,2016 : 515-516). Adat kebiasaan lama seperti perjudian, sabung ayam, masih marak di tengah masyarakat, Hal itu juga terjadi pada aspek aqidah. Praktek kehidupan yang mengandung syirik, tahyul, bid'ah, dan churafat masih marak terjadi. Praktek-praktek ilmu kebatinan dan perdukunan juga masih kuat. (Alaiddin Koto, 1997 :1997 : 18-19). Selain itu kehidupan masyarakat yang bercorak matrilineal memberikan warisan yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Semua pusaka diwariskan kepada pihak perempuan dari jalur keturunan ibu. Hal ini menyebabkan minimnya kedudukan dan tanggung jawab laki-laki di dalam keluarganya.

Keadaan itu tetap bertahan di tengah masyarakat karena tetap kuatnya kedudukan pemimpin adat. Para pemimpin adat mulai dari tingkat kerajaan sampai penghulu kaum di tingkat bawah mempnyai kedudukan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya mereka memimpin kaumnya dengan tetap berpedoman pada adat kebiasaan lama. Walaupun ada anggota masyarakat yang tidak menyetujui susuah bagi mereka untuk merubah keadaan karena mereka bisa saja dihukum oleh pemimpin adat dengan cara di dinda, diusir dari kampung, atau yang paling ringan dikucilkan oleh kaumnya sehingga sulit bagi mereka untuk melangsungkan kehidupan secara normal.

Salah satu elemen masyarakat yang paling tidak menyukai keadaan seperti itu adalah para ulama. Tapi peran mereka di tengah masyarakat tidaklah kuat karena posisi menentukan dipegang oleh kaum adat. Peran ulama pada umumnya adalah sebagai guru agama yang mengajar di surau mereka, serta memberikan tausiah dan pengajian didalam khutbah, maupun didalam acara-acara pengajian yang diadakan oleh masyarakat. Walaupun banyak di antara masyarakat yang menyetujui isi pengajian itu tetapi mereka tidak leluasa menerapkannya dalam kehidupan mereka karena kuatnya pengaruh pemimpin adat. Keadaan itu menyebabkan timbulnya hasrat dari para ulama untuk merubah kedaan sekalipun dengan cara kekerasan.

Kepulangan tiga orang haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik yang ingin melakukan gerakan pemurnian Islam seperti yang mereka saksikan di tanah Arab, menyebabkan keresahan para ulama semakin terformulasi ke dalam bentuk tindakan nyata. Status haji serta pengalaman yang diperoleh selama mereka berada di tanah suci menyebabkan mereka mendapat dukungan kuat dari para ulama dan masyarakat yang tidak menyukai para peran pemimpin adat. Kegiatan dakwah berlansung lebih marak. Berbeda dengan sebelumnya kegiatan dakwah diikuti oleh berbagai sanksi dan hukuman terhadap masyarakat apabila melakukan praktek kebiasaan yang dinilai bertentangan dengan dengan ajaran agama.

Kondisi itu selanjutnya menimbulkan reaksi dari para penghulu selaku pemimpin adat karena merasa wibawa dan kewenangann mereka telah dilangkahi oleh para ulama. Tidak sedikit dari orang-orang yang mendapat hukuman adalah anak dan keponakan dari para penghulu. Reaksi itu kemudian muncul dalam bentuk perlawanan fisik sehingga berujung pada

terjadinya perang saudara di Minangkabau yang sangat banyak memakan korban. Di antara para korban itu termasuk keluarga dan para pemimpin kerajaan Minangkabau. Perang yang semula berkobar di daerah luhak Agam selanjutnya meluas ke luhak 50 Kota, dan luhak Tanah Datar serta daerah pedalaman Minangkabau pada umumnya.

Kaum adat yang terdesak dalam perang tersebut meminta bantuan kepada Belanda, yang pada masa itu telah menguasai daerah pesisir barat dan berkedudukan di Padang. Belanda yang sudah lama berhasrat untuk menguasai daerah pedalaman Minangkabau tidak menyangka peluang tersebut dan bersedia berperang di pihak kaum adat. Sejak itu kaum ulama yang lazim dikenal dengan sebutan kaum Paderi tidak saja berperang melawan golongan adat melainkan berperang dengan Belanda dalam bentuk perang mengusir penjajah. Perang yang berlangsung dalam rentang waktu sekitar 17 tahun itu pada akhirnya di menangkan oleh Belanda yang ditandai dengan jatuhnya Benteng Bonjol pada tahun 1837.

Yang menarik dalam konteks sejarah ABS-SBK, kaum adat yang semula bersekutu dengan Belanda dalam memerangi kaum Paderi akhirnya berbalik melawan Belanda dan bersekutu dengan kaum Paderi setelah mengetahui maksud Belanda yang sebenarnya bukan untuk membantu mereka tetapi untuk berkuasa menjajah alam Minangkabau. Bersatunya kaum adat dan kaum Paderi didasari oleh suatu perundingan yang dilakukan di Bukit Marapalam Puncak Pato daerah antara Lintau dan Sungayang Tanah Datar. Pertemuan itu menetapkan diberlakukannya ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Walaupun secara formal Perang Paderi tidak berhasil menguasai struktur politik dan tata sosial Minangkabau di bawah kendali golongan agama sebagai akibat kekalahan dari Belanda, tetapi berhasil memantapkan kedudukan Islam dan memperluas pengaruh Islam ke seluruh sistem sosial. Sebuah formulasi adat yang baru diperkenalkan, formulasi itu menekankan perbedaan antara adat jahiliah (yaitu adat yang sinkretis yang belum mendapat pencerahan) dan adat Islamiyah (yang merupakan adat yang sesuai dengan hukum agama). Kini adat tertinggi yaitu adat yang benar-benar adat, diwakili oleh Al Qur'an dan Hadits. Kini hukum adat tunduk pada hukum agama, tercermindari ungkapan syarak mengata, adat memakai. Dengan demikian adat adalah wujud shah dari hukum agama (Taufik Abdullah, 2018 : 8-9)

Sebagai konsekuensi terdapatnya ABS-SBK semakin tingginya semangat kehidupan beragama di Minangkabau. Para ulama dan guru-guru agama menjadi sosok yang paling dihargai oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena para pemimpin adat telah kehilangan kekuasaan politik mereka berganti dengan kekuasaan yang dipengang oleh Belanda. Para pemimpin adat kini diberi kekuasaan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Belanda, dalam lembaga birokrasi Belanda yang disebut *Inlansche Bestuur*. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai regent (semacam kepala administrasi wilayah) baik untuk wilayah administrasi yang luas *hoofdregent* (Regen Gadang), maupun *regentschappen* untuk wilayah yang lebih rendah (Gusti Asnan, 2006 : 85-87). Terjadinya kolaborasi dengan Belanda menyebabkan golongan adat kurang dihargai oleh masyarakat kebanyakan.

Implementasi ABS-SBK ditandai dengan berkembangnya pendidikan Islam. Banyak diantara keluarga mampu yang menyekolahkan anaknya ke tanah Arab dan kembali pulang sebagai ulama besar dan mendirikan perguruan Islam atau paling tidak mendirikan surau sebagai pusat penyebaran ajaran keagamaan. Ada juga di antara mereka yang membuat surat kabar atau majalah yang dijadikan sebagai media dakwah Islam. Salah seorang diantaranya yaitu Syeh Ahmad Khatib bahkan tetap tinggal di Mekah menjadi imam mazhab syafii di Masjidil Haram dan menjadi guru bagi ulama-ulama besar Indonesia termasuk KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah serta KH. Hasyim Asyari pendiri Nahdhatul Ulama (Deliar Noer, 1985 : 30). Langkah ini selain dimaksudkan untuk mengimplementasikan konsep ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mensejajarkan diri dengan peradaban modern. Hingga memasuki awal abad 20 di Minangkabau telah berdiri banyak lembaga Pendidikan Islam yang kurikulumnya memadukan kurikulum Pendidikan agama dengan Pendidikan umum, sehingga memungkinkan bagi para lulusannya untuk bekerja tidak saja dalam lapangan keagamaan tetapi juga dalam bidang pekerjaan umum lainnya.

Hingga awal abad 20 di Minangkabau telah terdapat banyak perguruan Islam. Yang paling terkenal diantaranya adalah Sumatera Thawalib Padang Panjang yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah yang anaknya menjadi ulama besar Indonesia Prof. Dr Hamka

atau lebih dikenal Buya Hamka. Berikutnya adalah Sumatera Thawali Parabek yang didirikan oleh Syaikh Ibrahim Musa di Parabek Bukittinggi. Sekolah Adabiah yang didirikan oleh Syaikh Adullah Ahmaddi Padang (Deliar Noer, 1985 : 38-65). Semua lembaga Pendidikan yang disebut di atas umumnya didirikan oleh kalangan pembaharu Islam yang disebut kaum muda. Dalam kurun waktu yang agak belakangan (1926) berdiri pula perguruan berdiri pula Perguruan Islam yang merupakan representasi kaum tua dengan nama Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Syaikh Sulaiman Arrasuli di Candung Kabupaten Agam Alaidin Koto,1997 : 36).

Semua perguruan tersebut banyak menerima murid untuk belajar ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan umum. Para murid sekolah-sekolah tersebut tidak hanya berasal dari daerah Minangkabau sendiri tetapi banyak yang berasal dari Kawasan pulau Sumatera lainnya, bahkan dari Semenanjung Malaya. Setelah berhasil menyelesaikan program pendidikan mereka kembali ke daerah masing, mendirikan sekolah atau mengajar, ataupun bekerja pada instansi pemerintah ataupun swasta. Pada umumnya para lulusan sekolah terjalin ke dalam jaringan alumni. Seperti yang ditulis oleh koran Republika, keberadaan jaringan perguruan Thawalib di berbagai daerah, telah mengubah tradisi pendidikan yang berbasis tradisional ke arah model pendidikan berbasis modern. Dan pada saat itulah, Thawalib melahirkan banyak ulama yang kemudian menjadi bagian dari pergerakan Islam yang penting di wilayah Sumatera (Republika.co.id 30-5-2021)

Kembali ke konteks sejarah ABS-SBK di daerah Jambi maka dapat dikatakan bahwa kemunculan ABS-SBK di Jambi adalah kelanjutan pengaruh dari peristiwa sejarah yang terjadi di Minangkabau. Hal itu disebabkan karena Jambi dan Minangkabau punya keterkaitan sejarah yang sangat erat. Kerajaan Jambi yang terbentuk pada pertengahan abad 15, rajanya berasal dari Pagaruyung. Meskipun Kerajaan Jambi dan Kerajaan Minangkabau masing-masing berdiri sebagai sebuah kerajaan tapi keduanya masih terkait hubungan.

Menurut Edwin Loeb, di abad 14 dan 15 daerah Minangkabau meliputi seluruh Sumatera Tengah. Kerajaan terpecah menjadi tiga bagian, tiga luhak, tiga rantau dan delapan bab. Dalam luhak terdapat Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota..tiga luhak ini membentuk pusat Minangkabau. Tiga rantau (negeri) memiliki hubungan yang longgar dengan provinsi pusat meskipun mereka mengakui supremasi Maharaja Minangkabau. Tiga rantau tersebut adalah Rantau Kampar, Kuantan (Indragiri) dan Batanghari (Loeb, 2013 : 116). Dari keteraangan Loeb diatas jelaslah bahwa secara politik kerajaan Jambi adalah daerah bawahan Kerajaan Minangkabau, dan secara geografis wilayah Jambi adalah daerah rantau Minangkabau. Hubungan politik Jambi dan Minangkabau seperti yang dikatakan Loeb di atas terlihat jelas jika terjadi konfli internal dalam kerajaan Jambi sendiri. Bila perselisihan antar sesama penguasa terjadi biasanya mereka meminta raja Minangkabau untuk mendamaikan mereka. Mengutip apa yang dikatakan Andaya, intervensi Minangkabau dalam perselisihan Jambi merupakan sesuatu yang sangat penting karena para pengasa Pagaruyung dianggap begitu kondang dan kekuatan mereka dianggap hebat.

Surat-surat bertatahkan segel Yang Dipertuan Sakti atau dari Putri Jamilan (Sang Ratu Minangkabau) dan secara berkala tiba di Jambi dengan kuatnya mengingatkan berbagai tuntutan kuno tentang kemulyaan silsilah, agama, serta kesaktian benda-benda pusaka. Kerap kali sumber-sumber abad XVII menyinggung tentang kontrak-kontrak yang mengharuskan para raja Jambi menerima status mereka sebagai bawahan dari Pagaruyung, dan pentingnya kontrak-kontrak ini ditandai dengan retensinya dalam ingatan lokal yang mengacu kepada saan tatkala Yang Dipertuan dari Minangkabau ikut campur guna mencegah sengketa antara “cucu-cucu” Jambinya dan menempatkan penguasa yang diterima oleh semua pihak. Kisah-kisah yang disusun pada abad 19 menceritakan Kembali bahwa raja Minangkabau yang hebat yaitu Yang Dipertuan, pernah memanggil Sultan Jambi untuk menghadiri pertemuan di Semalidu (yang merupakan kampung perbatasan) “Saya ingin memberi rantau kepadamu, katanya, karena saya tidak kuasa mendatangi dan melihat semua kaula saya di Sungai Rantau. Saya ingin memberimu berbagai daerah mulai dari Semalidu ke Tanah Pilih mulai dari Tujuh Kota dan Sembilan Kota ke Jambi...dari Petajin (dekat Muara Tebo) ke Muara Sabak (dekat pesisir Pantai Sungai Neor) (Andaya, 2016 : 252-253).

Kedekatan sejarah antara Jambi dan Minangkabau juga dikemukakan oleh Elsbeth Locher Scholten. Menurutnya pada abad 18 Jambi mendapat pengaruh yang kuat dari Minangkabau sebagai akibat dari migrasi yang bermula pada sekitar pertengahan abad 17, dan merupakan

bagian dari arus emigrasi besar-besaran yang membawa orang-orang Minangkabau sampai ke pesisir-pesisir Semenanjung Malaya. Seratus tahun kemudian kecenderungan ini mencapai proporsi sedemikian besar, hingga seluruh dataran tinggi Jambi dikatakan telah “terminangkabaukan”. Emas adalah daya tarik kuat. Bahkan pada akhir abad 18 pertambangan emas Jambi sepenuhnya berada dibawah kontrol orang-orang asing itu. Jambi Ulu telah menjadi daerah Minangkabau... Pada akhir abad 18 Kesultanan Jambi menjadi negara vasal di bawah raja Minangkabau di Pagaruyung, yang persetujuannya harus diperoleh misalnya bagi pemilihan Sultan Jambi (Scholten, 2008 : 45).

Penjelasan ketiga sejarawan Barat itu menunjuk kedekatan hubungan sejarah antara Jambi dan Minangkabau tidak hanya secara politik, tetapi juga dari segi ekonomi dan asal-usul penduduk Jambi yang banyak berasal dari Minangkabau. Dalam hal asal-usul penduduk Jambi yang berasal dari Minangkabau tidak hanya terjadi di wilayah Jambi Hulu, Penduduk Tungkal yang wilayahnya berada di pesisir timur Jambi pun dikatakan sejarawan berasal dari Minangkabau yakni dari Periang Padangpanjang (Nasruddin, 1989 : 99).

Banyaknya penduduk Jambi yang berasal dari Minangkabau menyebabkan daerah Jambi menerima pengaruh budaya yang kuat dari Minangkabau, termasuk dalam hal adat-istiadat. Banyak sumber yang mengatakan bahwa hukum adat Jambi berasal dari Minangkabau. Hal itu terungkap dari pepatah yang mengatakan Undang turun dari Pagaruyung, taliti mudik dari Jambi meskipun dalam prakteknya menurut Kemas Arsyad Somad cenderung bercorak paternalistik (Fuad Rahman, 2020 : 68). Kuatnya pengaruh Minangkabau terhadap adat Jambi terlihat pada banyaknya kata-kata dalam hukum adat maupun seloko menggunakan Bahasa Minangkabau ataupun kata serapan dari Bahasa Minangkabau. Ketika mengulas Undang-undang Jambi yang disusun pada tahun 1866 Van Den Berg mengatakan bahwa hukum itu luar biasa karena hubungannya yang jelas dengan isi sumber-sumber hukum Palembang di satu pihak, serta dengan sumber-sumber Melayu Minangkabau di lain pihak (Van Den Berg, Oendang-oendang Djambi : 1866) Dengan demikian dapatlah dikatakan apabila adatnya berasal dari Minangkabau tentu masuk akal untuk mengatakan dasar falsafah adatnya juga berasal dari Minangkabau. Apalagi karena Undang-undang itu disusun setelah terjadinya konflik golongan adat dan agama yang melahirkan ABS-SBK di Minangkabau tiga puluh tahun sebelumnya.

Dalam hal ini konsep ABS-SBK yang muncul di Minangkabau sebagai buah dari Gerakan Pembaruan Islam selanjutnya berkembang ke dunia Melayu terutama ke daerah-daerah yang punya kaitan sejarah yang kuat dan yang menerima pengaruh kebudayaan yang kuat dari Minangkabau, terutama daerah-daerah Riau dan Jambi. Dapat diduga konsep itu dibawa ke Jambi melalui gelombang migrasi yang tak pernah henti dari Minangkabau ke daerah Jambi. Jika pada abad 16 dan 17 proses migrasi didorong oleh perkebunan perdagangan merica, maka pada abad 17 dan 18 didorong oleh penambangan dan perdagangan emas (Lindayanty, 2013 : 24)

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya migrasi suku-suku Minangkabau pada akhir 19 dan awal abad 20 sebagai efek dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem Birokrasi modern dalam pemerintahannya. Dalam sistem birokrasi modern perekrutan pegawai secara umum tidak dilakukan berdasarkan keturunan dan kebangsawanan seperti yang terjadi pada sistem birokrasi tradisional, melainkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang tercermin lewat kepemilikan ijazah. Dengan kata lain pegawai birokrasi hanya diisi oleh orang-orang yang lulus sekolah.

Sejak awal abad 20 daerah Jambi terintegrasi ke dalam negara kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian secara otomatis menjadi bagian dari sistem birokrasi pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia (Jakarta). Disamping itu terintegrasinya Jambi kedalam negara kolonial memberi keleluasaan bagi Belanda untuk mengeksploitasi daerah Jambi demi keuntungan pemerintah maupun swasta. Perkebunan karet dan penambangan minyak adalah sektor-sektor baru yang potensial untuk dilakukan di daerah Jambi.

Kedua hal tersebut baik birokrasi maupun eksploitasi sangat memerlukan tenaga terdidik. Tenaga terdidik tersedia biasanya di daerah-daerah yang banyak memiliki lembaga pendidikan atau sekolah. Hingga masa kemerdekaan daerah Minangkabau adalah daerah yang paling banyak memiliki sekolah di pulau Sumatera. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, Daerah Minangkabau lebih dulu terintegrasi ke dalam sistem negara kolonial sehingga mendorong pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam birokrasi pemerintah, pertambangan batubara, pabrik

semen, Perusahaan Kereta Api, Perusahaan Pelayaran, maupun untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi dalam perkebunan kopi dan sebagainya.

Kedua, sejak pertengahan terakhir abad 19, pemerintah kolonial menjalankan Politik Etis yang salah satu aspeknya berisi program memajukan pendidikan warga pribumi. Biasanya pemerintah kolonial mendirikan-lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah yang padat penduduknya. Daerah Minangkabau tergolong pada daerah yang memiliki penduduk yang padat. Menurut catatan Anthony Reid tentang kota-kota Kawasan Asia Tenggara pada abad 16, kota Pagaruyung telah berpenduduk sebanyak 32.000 jiwa (Reid, 1988 : 71-72) Angka itu adalah angka yang besar untuk ukuran penduduk sebuah kota pada abad itu. Keterangan Raffles ketika dia melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau daerah yang dikatakannya sebagai sumber peradaban Melayu, memperkirakan jumlah penduduk seluas radius 50 Mil dari Pagaruyung berjumlah sekitar 1 juta jiwa Reid, 2010 Apa bila luas itu di perkirakan separo dari daerah Sumatera Barat sekarang tentulah jumlah penduduk Sumatera Barat ketika itu kurang lebih 2 juta orang. Angka itu tentu akan lebih besar lagi sekiranya penduduk Minangkabau tidak merantau atau bermigrasi ke daerah lain. Tentang migrasi ini Reid mengutip hasil sensus 1930 yang mengatakan sebanyak 211.000 penduduk Minangkabau telah merantau atau tinggal di tempat lain. Jumlah itu mencakup 11 persen dari Jumlah penduduk Sumatera Barat ketika itu. Kelompok terbesar adalah ke Jambi 58.000, ke Riau 51.000 ke Sumatera Timur dan ke Malaya 14.000 (Reid, 2011 : 51-52) Jika dibandingkan dengan Jambi, jumlah penduduk Jambi berdasarkan sensus 1930 berjumlah 234,533 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 57.929 atau 25% adalah imigran asal Minangkabau (Lindayanty, 2013 : 29).

Belanda untuk pertama kali mendirikan sekolah di Sumatera Barat pada tahun 1846. Kebanyakan sekolah dengan mendirikan sekolah di daerah-daerah pusat-pusat pasar dan administrative di dataran tinggi seperti Bukittinggi, Batusangkar, dan Solok Untuk periode selanjutnya jumlah sekolah terus berkembang dengan berbagai kategori dan tingkatan sekolah. Sekolah yang paling banyak adalah sekolah nigrari, selain itu ada sekolah pribumi lainnya seperti Inland School, sekolah Desa Volk School dan sekolah sambungan Vervolgschool. Selain itu ada Sekolah Dasar dengan standar pendidikan Belanda yaitu HIS, selanjutnya MULO untuk setingkat SMP dan AMS untuk tingkat SMA. Selain itu terdapat juga beragam sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertukangan dan Sekolah Pertanian, Sekolah Teknik dan Kejuruan Wanita (Martamin, 1997:81-82) Sekolah penting lainnya Sekolah Guru (Normal School) di Bukittinggi atau dalam Bahasa Belanda disebut (Kweekschool) didirikan 1856. Sekolah ini adalah satu-satunya yang ada di pulau Sumatera. Sebenarnya ada sekolah sejenis di Tapanuli 1864 tapi ditutup sepuluh tahun kemudian. Begitu juga di Padang Sidempuan pernah didirikan 1878 tapi ditutup kembali empat tahun kemudian dengan alasan penghematan anggaran pemerintah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kweekschool>).

Semua sekolah diatas dapat dikatakan sekolah umum dan kejuruan. Dalam hal ini tidak termasuk sekolah-sekolah agama, serta sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta seperti oleh Muhammadiyah, serta INS yang didirikan oleh M.Syafei 1926. Yang menarik adalah keberadaan sebuah sekolah kejuruan yang terdapat di Matur. Sekolah ini sangat langka dan hanya ada satu untuk pulau Sumatera.. Sekolah itu adalah Sekolah Ukur yang kompetensinya adalah juru ukur tanah dan topografi. Permintaan terhadap lulusan sekolah ini sangat besar untuk kepentingan pembuatan jalan, perusahaan Perkebunan, Pertambangan Minyak, Perencanaan Kota, serta Pekerjaan umum lainnya (Naim, 1984: 259)

Jika situasi pendidikan di Sumatera Barat di atas dibandingkan dengan Jambi, maka perbedaannya cukup kontras karena pada waktu yang sama di Jambi hanya terdapat sekolah-sekolah desa 3 tahun (Volksschool) kemudian Sekolah Dasar Lanjutan lima tahun Vervolgschool yang terdapat di kota Ondrafdeeling (distrik), serta satu buah HIS di Jambi yang semula diperuntukan untuk anak-anak ambtenaar atau pegawai pemerintah Selain itu terdapat lima madrasah yang terdapat di Tanjung Johor, Tanjung Pasir, Tahtul Yaman, Kampung Tengah dan Sungai Asam (Zainuddin, 1979 : 53-54).

Ketiga Tersedianya jumlah sekolah yang banyak diikuti pula oleh antusias yang besar untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini didorong oleh kesadaran untuk menjadi pegawai birokrasi karena dapat menjadi sarana baru yang penting menuju kekuasaan. Pristise, dan kekayaan (Graves, 2007 :149)

Efek kemajuan pendidikan di Minangkabau langsung terasa di Jambi sejak awal abad 20. Sejak saat itu pos birokrasi pemerintah kolonial termasuk guru-guru sekolah banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari Minangkabau. Hal itu terutama disebabkan karena kebutuhan pemerintah kolonial akan tenaga administrasi (Scholten, 2008 :313).

Uraian di atas menunjukkan secara Panjang-lebar tentang aspek-aspek migrasi orang Minangkabau ke daerah Jambi dengan berbagai ragam latar belakang dan tujuan. Dari keseluruhan para migran atau perantau tersebut, setibanya ditinjau ada yang sebagai petani dan pedagang merica, ada yang sebagai penambang dan penjual emas, ada juga yang bekerja sebagai pegawai birokrasi dan guru, bahkan ada pula yang sengaja datang sebagai pendakwah. Dalam konteks sejarah ABS-SBK tentu saja para migran itu membawa adat dan kebudayaannya ke daerah baru. Hal itu secara antropologis adalah sesuatu yang lazim dalam perkembangan kebudayaan. Dari segi hubungan dengan masyarakat dan penguasa rantau, tidak sedikit diantara mereka yang punya kedekatan dengan penguasa sehingga berhasil menduduki posisi-posisi jabatan menentukan, bahkan mungkin sebagai pengurud dari lembaga adat Melayu Jambi. Maka lewat itulah konsep ABS-SBK dimasukkan sebagai unsur adat Melayu Jambi.

Disamping itu faktor yang patut dipertimbangkan juga adalah tentang cukup banyaknya orang Jambi sendiri yang menimba ilmu di Minangkabau baik pada bidang Pendidikan Umum maupun Pendidikan Agama. Sebagai seorang yang bertahun-tahun menetap di daerah yang menganut ABS-SBK tentulah mereka sangat paham tentang konsep tersebut. Dan karena adat yang berlaku di daerah asalnya relative sama dengan adat Minangkabau maka tentulah mereka ingin menerapkannya pula.

SIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa ABS-SBK adagium falsafah adat bersandikan kepada ajaran agama Islam, sedangkan agama Islam bersandikan kepada kitab suci Al Qur'an. Konsekuensinya adalah adat yang dijalankan adalah adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Adagium ini sekarang dijadikan dasar filosofis adat dunia Melayu terutama di Minangkabau, Riau, Jambi, bahkan di Malaysia.

Untuk daerah Jambi, bila ABS-SBK itu ditelusuri sejarahnya, maka terdapat dua pendapat. Pertama adalah pendapat yang mengatakan ABS-SBK muncul dari peristiwa sejarah yang terjadi dalam daerah Jambi sendiri, yakni Pertemuan Bukit Siguntang Tanjung Simalidu tahun 1502. Tetapi bila alasan ini dianalisis dalam perspektif metodologi sejarah maka faktanya sangat lemah, karena tidak ditemukan arsip atau dokumen sejarah dari pertemuan itu yang mencantumkan ABS-SBK sebagai dasar hukum adat Melayu Jambi. Selain itu juga tidak ada bukti-bukti tertulis di sekitar pertemuan itu apakah itu yang berhubungan dengan latar belakang maupun sebagai tindak lanjutnya yang menguatkan pertemuan Bukit Siguntang sebagai fakta sejarah. Sejauh ini keterangan tentang pertemuan Bukit Siguntang tersebut berasal dari tradisi lisan yakni tuturan cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dari segi metode sejarah sumber ini adalah sumber terakhir yang yang bisa digunakan setelah tidak ada sumber lain yang lebih kuat yang mengacu pada peristiwa yang sama.

Tetapi sekalipun sumber tradisi lisan itu tetap digunakan sebagai sumber sejarah maka status datanya tetap lemah untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. Hal itu disebabkan karena setelah melalui kritik sumber, terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pertemuan itu dengan narasi hasil pertemuan. Selain itu terdapat pula ketidak sinkronan isi teks data dengan fakta sejarah lain yang berkaitan dengan sumber tersebut.

Pendapat kedua adalah yang menyatakan bahwa ABS-SBK berasal dari Minangkabau. Pendapat ini bertolak dari peristiwa konflik yang terjadi antara kaum adat yang ingin mempertahankan adat lama dan kaum agama (Paderi) yang ingin melakukan pembaharuan dengan menerapkan totalitas ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Konflik tersebut selanjutnya menjelma menjadi perang saudara, serta mengundang keterlibatan Belanda dalam peperangan tersebut. Konflik itu akhirnya berujung perdamaian antara kaum adat dengan kaum Padri. Perdamaian itu menghasilkan kesepakatan tentang hubungan adat dan agama yang melahirkan adagium ABS-SBK. Pada perkembangan selanjutnya ABS-SBK juga mempengaruhi sistem adat di dunia Melayu lainnya terutama di Riau dan Jambi. Pengaruh itu didasarkan pada hubungan sejarah yang sangat erat (politik, ekonomi, dan kebudayaan) antara Minangkabau dan Jambi. Selain itu terjadinya migrasi yang tiada henti penduduk Minangkabau

ke Jambi, serta banyaknya putra-putri Jambi yang menuntut ilmu di Minangkabau semakin mempercepat dijadikannya ABS-SBK sebagai dasar filosofis adat Melayu Jambi.

Jika pendapat ini dinilai berdasarkan kaca mata teori dan metode sejarah, maka pendapat kedua cenderung lebih kuat. Alasannya karena pendapat itu banyak didukung oleh sumber yang valid. Sangat banyak sumber-sumber yang ditulis Belandaberupa arsip, surat-surat dinas, maupun laporan yang menggambarkan konflik yang terjadi. Selain itu bukti-bukti sejarah sebagai konsekuensi dari lahirnya ABS-SBK juga sangat banyak. Kalau pun kita ingin menuliskannya berdasarkan keterangan lisan maka itu pun masih layak sebagai sumber karena terjadinya peristiwa itu hanya sekitar satu, sampai tiga generasi dari pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang melihat peristiwa itu secara langsung. Apa lagi kenyataannya berbagai sisi peristiwa itu telah banyak ditulis orang tak lama setelah peristiwa itu terjadi dalam bahasa Rusli Amran ketika Gerakan tersebut masih hangat dipersoalkan orang (Rusli Amran, 1981 :385).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Gafari, "Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi". Tesis PPs UII Yogyakarta. 2018
- Alaiddin Koto. Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970. Jakarta. Nimas Multima. 1997
- Amir Luthfi.. Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942. Pekanbaru, Susqa Press. 1991
- Andaya, Barbara Watson. Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII-XVIII. Yogyakarta. Penerbit Ombak.2016
- Aulia Tasman. Memahami Adat Lamo Pusako Usang Malpu 39. 1 Oktober 2014
- Berg, Van den. Oendang-oendang Djambi 1866
- Deliar Noer. Gerakan Moderen Islam di Indonesia. Jakarta. LP3ES. 1985
- Fuad Rahman. Kuasa Simbolik Adat dan Syarak Dakam Tradisi Masyarakat Melayu. Jambi. PPs UIN Sultan Thaha.2020
- Garraghan, Gilbert, J. A Guide to Historical Method. New York Fordham University Press.1957
- Graves, Elizabeth. Asal-usul Elite Minangkabau Modern. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.2007
- Gusti Asnan. Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi. Jogyakarta. Cipta Pustaka. 2006
- Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah. Jogyakarta.Penerbit Ombak.2007
- Jamhir. Revitalisasi Hukum Adat Aceh.Jurnal Justisia Vol1 No.1.2016
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Jogyakarta. Yayasan Bentang Budaya.1995
- Lindayanty. Jambi Dalam Sejarah 1500-1942. Jambi. Disbudpar 2011
- Loeb, Edwin M. Sumatra Sejarah Dan Masyarakatnya. Jogyakarta. Penerbit Ombak.2013.
- Marjani Martamin. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat. Jakarta. Depdikbud. 1997
- Marsden, William,F.R.S. Sejarah Sumatera. Jogyakarta. Penerbit Indo Literasi.2016
- Mestika Zed. Metodologi Sejarah Teori Dan Aplikasi. Padang. Jurusan Sejarah FIS UNP. 2005
- M.D. Mansur. Sejarah Minangkabau. dkk. Jakarta. Bharata. 1970.
- Muchtar Agus Cholif Timbul Tenggelam Persatuan Wilayah Luak XVI Tukup Khunut di Bumi Tambang Teliti. 2009. Tanpa Penerbit
- Muchtar Naim. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Jogyakarta. Gajah Mada University Press. 1984
- Muhamad Radjab. Perang Paderi di Sumatera Barat 1803-1808. Jakarta Balai Pustaka. 1964
- Mukti Nasrudin. Jambi Dalam Sejarah Nusantara. Naskah tidak diterbitkan.
- Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari. Undang-Undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi. Jakarta. Dept P & K. 1982
- Nina Herlina. Historiografi Barat. Bandung.Satya Historica.2010
- Outhwaite, William. Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern. Jakarta. Kencana.2008
- Reid Anthony. Menuju Sejarah Sematra Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia . 2011
- Reid, Anthony. South-East Asia in The Age of Commers 1450-1680.New Haven London.Yale University Press.1992
- Reid, Anthony. Sumatera Tempo Doeloe. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.201 Republika.co.id 20-5-2021

- Rusli Amran. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta. Sinar Harapan. 1981.
- Scholten, Elsbet Locher. Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial. Jakarta. Bana KITLV. 2008.
- Taufik Abdullah. Sejarah Lokal di Indonesia. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.1990
- Taufik Abdullah. Sekolah dan Politik Pergerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933. Jogjakarta. Suara Muhammadiyah. 2018
- Vansina, Jan. Oral Tradition As History. Wisconsin. The Wisconsin University of Wisconsin Press.1985
- Zainuddin.Dkk. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi. Jakarta. Depdikbud 1979
- Zikri Darussamin. Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau Dengan Islam.Jurnal Sosial Budaya, Vol.11, No.2 Juli - Desember 2014